

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke : 4
Masa Persidangan : II
Tahun : 2021-2022
Pada hari : Rabu
Tanggal : 9 Maret 2022
Dimulai pada jam : 11.03 WIB.
Sampai dengan jam : 15.30 WIB.
Pimpinan Rapat : 1. Yunianto, S.P - Ketua
2. Muh Amin, S.Ag - Wakil Ketua
3. Drs. Tunggul Purnomo - Wakil Ketua
4. Daniel Indra Hartoko, SE - Wakil Ketua
Sekretaris Rapat : Agus Munadi, S.Sos.,M.Si - Sekretaris DPRD
Jumlah hadir : 40 orang dari 45 orang anggota DPRD
Tidak hadir : 5 orang anggota DPRD
Acara :
1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor P/0409/130/01.1/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, perihal Permohonan Pembahasan LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2021;
3. Penutup

Pimpinan Rapat : Yunianto, S.P (Ketua DPRD)

Jalannya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Hadirin, Pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang berbahagia, baik yang hadir diruangan ini maupun yang mengikuti acara Rapat Paripurna pada hari ini secara virtual.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : P/0409/130/01.1/II/2022 Tanggal 22 Februari 2022 Perihal Permohonan Pembahasan LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2021.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 40 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 144 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan selalu memohon bimbingan dan ridho Allah SWT dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan ke II tahun 2021-2022 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 pukul 11.03 WIB kami buka serta terbuka untuk umum ----- ketuk palu 3 kali

Rapat Paripurna dan Hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : P/0409/130/01.1/II/2022 Tanggal 22 Februari 2022 Perihal Permohonan Pembahasan LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2021;
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 2/BAMUS/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, hari ini kita akan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021.

Mengawali kegiatan dimaksud, maka kami persilakan kepada Saudara Bupati Temanggung untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021.

Kepada Saudara Bupati Temanggung dipersilakan ----- Stop.

SAMBUTAN BUPATI TEMANGGUNG

OLEH H. M. AL KHADZIQ

SAMBUTAN BUPATI TEMANGGUNG PADA RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2021

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya.

Yang saya hormati:

- Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Rekan-Rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung;
- Saudara Wakil Bupati Temanggung;
- Saudara Sekretaris Daerah, beserta segenap jajaran eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- Para Direktur BUMD, Para pemerhati Dewan, dan teman-teman dari kalangan pers, serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah pada kesempatan yang membahagiakan ini, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung dalam acara Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021 kepada DPRD Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungannya.

Atas rahmat Allah SWT, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang menuju terwujudnya Temanggung yang "TENTREM, MAREM, dan GANDEM". Kemajuan dan tercapainya hasil-hasil pembangunan di berbagai bidang merupakan hasil usaha dan kerja keras kita bersama. Untuk itu saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Temanggung, yakni segenap pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintahan, Forkopimda, para pelaku usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan yang membahagiakan ini akan saya sampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2021. Karna Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tujuan dari penyusunan dan penyampaian LKPJ ini adalah untuk menyampaikan gambaran umum pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung, serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah atas amanat yang diberikan oleh masyarakat.

Penyampaian LKPJ, pembahasan LKPJ, dan selanjutnya rekomendasi DPRD guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dapat dimaknai sebagai wujud pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2021.

Secara garis besar, LKPJ memuat semua penyelenggaraan pemerintahan yaitu:

- Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah; dan
- Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan penugasan.

Hadirin yang saya hormati,

Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2021 telah dilaksanakan berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik itu RKPD, KUA-PPAS, maupun APBD Tahun Anggaran 2021. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah telah dilaksanakan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu juga dalam rangka menjawab isu-isu serta permasalahan strategis yang perlu dipecahkan oleh daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan secara umum pada tahun 2021 adalah adanya rasionalisasi anggaran. Namun berkat kerja keras kita bersama permasalahan tersebut dapat kita atasi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pada masing-masing perangkat daerah tetap berjalan sesuai rencana, utamanya penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikut secara singkat akan saya sampaikan beberapa capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Pertama, Capaian Kinerja Makro

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator komposit yang menggambarkan keterkaitan antara indikator pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat di Kabupaten Temanggung, tercapai sebesar 69,88 (enam puluh sembilan koma delapan puluh delapan). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,31% (nol koma tiga puluh satu persen), sehingga masuk dalam kategori sedang. Sedangkan komponen – komponen pendukung IPM adalah sebagai berikut:
 - a. Angka Harapan Hidup mencapai 75,64 (tujuh puluh lima koma enam puluh empat) tahun.
 - b. Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,32 (dua belas koma tiga puluh dua) tahun.
 - c. Angka Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) tahun.
 - d. Pengeluaran riil per kapita sebesar Rp9.408.000,- (sembilan juta empat ratus delapan ribu rupiah).
2. Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebesar 10,17% (sepuluh koma tujuh belas persen). Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2020 yang semula sebesar 9,96% (sembilan koma sembilan puluh enam persen), hal ini disebabkan banyak warga yang mengalami dampak pandemi *Covid-19*.

3. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 mengalami peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 3,85% (tiga koma delapan lima persen) menjadi 2,62% (dua koma enam puluh dua persen).
4. Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Per kapita, dan Ketimpangan Pendapatan belum dapat saya sampaikan pada saat ini karna angka capaian tersebut belum rilis.

Sidang Dewan yang terhormat,

Yang Kedua, Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.1.883.645.026.164,- (satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta dua puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah), dengan realisasi sebesar Rp.1.970.984.143.681,- (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau tercapai sebesar 104,64% (seratus empat koma enam puluh empat persen).

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebesar Rp.2.053.340.949.247,- (dua triliun lima puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), terealisasi sebesar Rp.1.877.946.263.818,- (satu triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah) atau sebesar 91,46% (sembilan puluh satu koma empat puluh enam persen).

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp.170.943.242.545,- (seratus tujuh puluh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp.170.685.562.258,- (seratus tujuh puluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) atau tercapai 99,85% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima persen). Untuk Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.1.247.319.462,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), terealisasi sebesar Rp.1.243.879.610,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), dengan demikian terdapat pembiayaan Netto Tahun 2021 sebesar Rp.169.441.682.648,- (seratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah). Jumlah SiLPA tahun 2021 adalah sebesar Rp262.479.562.511,- (dua

ratus enam puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah).

Angka-angka sebagaimana tersebut merupakan angka sementara (*unaudited*) sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan secara final akan dilaporkan secara tersendiri dalam kesempatan yang lain.

Sidang Dewan yang terhormat,

Yang Ketiga, Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021.

a. Urusan Pendidikan

Dalam melaksanakan urusan pendidikan, didukung dengan 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan, dan 40 (empat puluh) sub kegiatan. Adapun capaian kinerja urusan pendidikan antara lain:

1. Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini tercapai 95.72% (sembilan puluh lima koma tujuh puluh dua persen).
2. Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar tercapai 92.07% (sembilan puluh dua koma nol tujuh persen).
3. Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan tercapai 25.52% (dua puluh lima koma lima puluh dua persen). Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator ini adalah rendahnya minat belajar pada anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan tuntutan faktor ekonomi yang mengakibatkan anak usia pendidikan harus bekerja.

b. Urusan Kesehatan

Dalam melaksanakan urusan kesehatan, didukung 3 (tiga) program, 6 (enam) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan. Adapun capaian kinerja urusan kesehatan antara lain:

1. Pelayanan dasar kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir tercapai 100% (seratus persen).
2. Pelayanan dasar kesehatan balita tercapai 81,64% (delapan puluh satu koma enam puluh empat persen).
3. Pelayanan dasar kesehatan pada usia pendidikan dasar tercapai 84,92% (delapan puluh empat koma sembilan puluh dua persen), usia produktif tercapai 69,25% (enam puluh sembilan koma dua puluh lima), usia lanjut tercapai 89,52% (delapan puluh sembilan koma lima puluh dua).
4. Pelayanan dasar kesehatan penderita hipertensi tercapai 30,97% (tiga puluh koma sembilan puluh tujuh persen), diabetes militus tercapai 92,50% (sembilan puluh dua koma lima puluh persen), orang dengan gangguan jiwa berat tercapai 102,63 (seratus dua koma enam puluh tiga persen), orang terduga tuberkulosis tercapai

62,68% (enam puluh dua koma enam puluh delapan persen), dan orang terduga dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) tercapai 73,49% (tujuh puluh tiga koma empat puluh sembilan persen).

Pada capaian kinerja urusan kesehatan terdapat beberapa yang capaiannya rendah dikarenakan adanya Pandemi *Covid-19* dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga kegiatan yang seharusnya dilaksanakan langsung dengan masyarakat tidak bisa berjalan sebagaimana semestinya.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, didukung dengan 11 (sebelas) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Adapun capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

1. Pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari tercapai 94,52% (sembilan puluh empat koma lima puluh dua persen).
2. Pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik tercapai 67,64% (enam puluh tujuh koma enam puluh empat persen).

Permasalahan yang muncul dalam pencapaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya pelayanan pengolahan air limbah domestik disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan air limbah baik secara mandiri maupun komunal.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, didukung dengan 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain:

1. Pelayanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana tercapai 100% (seratus persen).
2. Pelayanan dasar Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah tercapai 100% (seratus persen).

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam melaksanakan urusan ini di dukung dengan 5 (lima) program , 10 (sepuluh) kgiatan, dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Adapun capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

1. Pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum tercapai 100% (seratus persen).
2. Pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana tercapai 100% (seratus persen).

3. Pelayanan dasar pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tercapai 100% (seratus persen).
4. Pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tercapai 100% (seratus persen).
5. Pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tercapai 47,73% (empat puluh tujuh koma tujuh puluh tiga persen).

Beberapa hal yang menyebabkan capaian target pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran masih rendah adalah:

- a. Keterbatasan jumlah pos pemadam kebakaran, armada, dan SDM pemadam kebakaran.
- b. Kondisi lingkungan permukiman yang padat yang sulit diakses oleh armada pemadam kebakaran.

f. Urusan Sosial

Dalam melaksanakan urusan sosial, didukung dengan 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Adapun capaian kinerja urusan sosial antara lain:

1. Pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti tercapai 100% (seratus persen).
2. Pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti tercapai 100% (seratus persen).
3. Pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti tercapai 100% (seratus persen).
4. Pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti tercapai 100% (seratus persen).
5. Pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota tercapai 100% (seratus persen).

Sidang Dewan dan Hadirin sekalian

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat tugas pembantuan dan penugasan dapat kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan pembantuan yang dilaksanakan pada tahun 2021 ada pada urusan pertanian.

Capaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dan penugasan pada urusan pertanian dilaksanakan dalam 5 (lima) program yaitu:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura tercapai 100% (seratus persen);
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura tercapai 100% (seratus persen);

3. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura tercapai 100% (seratus persen);
4. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian dan Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida, Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian tercapai 100% (seratus persen);
5. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian tercapai 100% (seratus persen).

Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia,

Berkat kerja keras dari semua pihak dan komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Temanggung, pada tahun 2021, Kabupaten Temanggung meraih berbagai prestasi dan penghargaan yang membanggakan baik di tingkat Provinsi dan bahkan di tingkat Nasional. Prestasi dan Penghargaan yang diraih antara lain:

1. Predikat Penilaian "B" atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Predikat "B" atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Medali Opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" atas hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Ini merupakan opini WTP yang ke sembilan kalinya secara berturut-turut;
4. Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2021 mendapatkan Predikat "*Finalis*" atas dokumen Perencanaan pada tahun 2020 yang diberikan di tahun 2021 dengan catatan semoga tahun ini penghargaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dapat menjadi juara satu di Provinsi Jawa Tengah dan kemudian bisa menjadi juara satu tingkat Nasional kembali;
5. Penghargaan Kabupaten Terinovatif, *Innovative Government Award (IGA)* Kategori Kabupaten tingkat Nasional;
6. Penghargaan atas capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah Kabupaten/Kota ke-2 se-Jawa Tengah. Tingkat Pengangguran terbuka terendah ke-2 dari seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Selain prestasi dan penghargaan tersebut di atas, masih banyak prestasi dan penghargaan yang juga diraih oleh masyarakat baik secara perorangan, kelembagaan, maupun kelompok masyarakat yang membawa harum nama Kabupaten Temanggung di tingkat Provinsi dan Nasional sepanjang tahun 2021 yang tidak dapat disampaikan satu per satu.

Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Demikian telah saya sampaikan secara singkat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung selama Tahun 2021, selanjutnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2021 telah disajikan secara lengkap dalam Dokumen LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2021.

Kami menyadari bahwa masih banyak yang harus kita selesaikan, seiring dengan dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat. Berbagai program pembangunan yang belum berhasil dicapai, tentunya menjadi tantangan bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi. Koordinasi, kebersamaan, dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Daerah dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Temanggung selama ini, agar terus kita pelihara dan kita tingkatkan untuk mewujudkan Temanggung yang “TOTO, TITI, TENTREM, MAREM, DAN GANDEM”.

Akhirnya, atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada DPRD Kabupaten Temanggung selaku mitra kerja Pemerintah Daerah dan juga seluruh lapisan masyarakat Temanggung, yang telah bersama-sama mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Untuk selanjutnya, dengan segenap kerendahan hati, kami mohon saran dan masukan, guna perbaikan serta peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Kabupaten Temanggung yang akan datang. Semoga Allah SWT meridhoi niat dan upaya kita bersama, dalam membangun masyarakat Kabupaten Temanggung yang kita cintai.

Sekian, Terima kasih

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

BUPATI TEMANGGUNG,

H.M. AL KHADZIQ

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang terhormat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta merujuk Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung Pasal 26 dan 27, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain meliputi : pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta pelaksanaan

Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD Kabupaten Temanggung dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka setelah LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2021 disampaikan, kita perlu mendengarkan Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2021. Namun demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tanyakan apakah perlu dibuka acara Pandangan Umum Fraksi DPRD ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Untuk itu kepada Fraksi-Fraksi DPRD yang akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya dipersilahkan untuk mencatatkan diri ----- Stop.

Menurut catatan kami ada 7 Fraksi yang akan menyampaikan pandangannya yaitu :

1. Fraksi Golkar Yang akan disampaikan oleh Sdr. Slamet, SE
2. Fraksi Nusantara Yang akan disampaikan oleh Sdr. Siti Margo Lestari, BA
3. Fraksi PKB Yang akan disampaikan oleh Sdr.Dedi Hariyadi, SE.
4. Fraksi Gerindra Yang akan disampaikan oleh Sdr. Chakiem Harmoko H.CK.SH
5. Fraksi PPP Yang akan disampaikan oleh Sdr. Ahmad Syarif Yahya
6. Fraksi PDI P Yang akan disampaikan oleh Sdr. Riyadi Kaunaen SPd, MAP
7. Fraksi PAN Berkeadilan Yang akan disampaikan oleh Sdr. Budi

Mengawali Pandangan Umum Fraksi DPRD, dipersilakan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Golkar disilakan ----- Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GOKAR OLEH SLAMET, SE
--

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2021

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati :

Yang kami hormati, Ketua rapat dan para Wakil ketua DPRD

Yang kami hormati, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

Yang saya hormati, Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yang saya hormati, Saudara Sekda, para Asisten Sekda, para Kepala Dinas, Kantor, Badan, Camat, Ketua KPUD dan Direktur BUMD

Yang saya hormati, Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan Pers dan segenap anggota DPRD yang berbahagia

Sebelumnya, perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sdr. Bupati yang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2021 tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

Secara umum capaian kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan sudah berjalan sesuai yang direncanakan, namun ada yang perlu kami sampaikan terhadap kebijakan strategis tahun 2021 yang tercantum pada Perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu pemulihan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pengurangan kemiskinan, di samping urusan wajib yang menjadi kegiatan rutin tahunan, pada tataran urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2021 tersebut diatas ternyata masih banyak yang belum tersentuh secara maksimal. Maka bersama ini Fraksi Partai Golkar ada beberapa catatan dan pertanyaan yang perlu kami sampaikan dengan harapan sebagai dasar dan materi awal pada pembahasan LKPJ pada tingkat pembahasan selanjutnya sekaligus guna perbaikan di masa yang akan datang.

Beberapa catatan dan pertanyaan yang perlu kami sampaikan, antara lain sebagai berikut:

A. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Bidang Belanja

Sebagian anggaran belanja daerah yang bersumber dari DBHCHT yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang disebabkan sulitnya menentukan sasaran atau obyek, yaitu anggaran yang diperuntukkan untuk Bantuan kepada buruh petani tembakau, sehingga mengakibatkan SiLPA yang cukup besar. Pertanyaan, apa sikap dan upaya yang telah dilakukan Pemda untuk permasalahan ini?

2. Pembiayaan Daerah

Penundaan penyertaan modal pada beberapa BUMD sebagai akibat kebijakan pemerintah daerah, dari sekian BUMD salah satunya yaitu PD Aneka Usaha, yang

sampai saat ini Pemda belum mengambil sikap terhadap hasil kajian pihak independen, apakah mau terus dioperasionalkan atau ditutup, mohon jelaskan.

B. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

1. Pendidikan

Realisasi capaian pelayanan dasar Pendidikan Dasar tercapai 92,07% dari jumlah anak usia 7-15 dari jumlah anak 113.582, ini artinya terdapat +- 9000 anak yang tidak bersekolah, mohon penjelasannya.

2. Kesehatan

Situasi pandemi yang belum usai mengharuskan ada pergerakan yang lebih efisien dalam penanganan untuk menunjang kualitas kesehatan masyarakat. Rencana apa yang akan dijalankan untuk mengatasinya selain percepatan vaksinasi dan sosialisasi proses?

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tingginya gaya hidup konsumtif masyarakat yang menghasilkan banyak sampah memunculkan persoalan yang rumit. Bagaimana penyelesaian problem tersebut jika setiap tahun jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat meningkat?

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bertambahnya penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan menjalarnya bangunan di daerah perkotaan dan dikhawatirkan menimbulkan kepadatan bangunan yang akan berdampak buruk bagi lingkungan. Bagaimana tanggapan atas persoalan ini?

5. Lingkungan Hidup

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) perlu dikelola dengan tepat. Perlu sosialisasi secara rutin kepada pelaku usaha agar limbah tersebut dapat dikelola dengan baik dan benar. Dibutuhkan inisiatif dari semua pihak agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dari limbah. Monitoring ke pelaku usaha harus sering dilakukan sebagai bentuk pengawasan. Mohon tanggapannya.

C. Pelaksanaan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Capaian produksi yang menggembirakan tidak dibarengi dengan daya beli yang menguntungkan petani. Sehingga Petani tidak mampu menikmati kesejahteraan meskipun sudah bekerja keras. Dinas semestinya mampu melakukan tindakan penataan kuantitas komoditas agar tidak terjadi over produksi yang menyebabkan pelemahan nilai tawar petani, mohon tanggapannya.

2. Perindustrian

Perkembangan industri menengah ke atas cukup membanggakan, namun terhadap perkembangan industri kecil UKM yang notabenenya pemilik pribumi dan

masyarakat kecil belum memuaskan dan sayangnya sampai saat ini produk yang dapat dijadikan ciri khas Temanggung belum kita jumpai, mohon tanggapan.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Akhirulkalam, Wabillahi taufiq wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 9 Maret 2022

FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Slamet, S.E Sekretaris Ishadi ditandatangani

Kepada saudara Slamet, SE selaku Juru Bicara Fraksi Golkar kami sampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Nusantara untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi Nusantara disilakan -----
----- Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI OLEH SITI MARGO LESTARI, BA
--

PANDANGAN UMUM FRAKSI NUSANTARA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Bismillahirrohmanirohim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat. Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan,

Yang terhormat. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung,

Yang terhormat. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, atau yang mewakili

Yang kami cintai. Saudara Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah, Para Kepala SKPD, Para Pimpinan BUMD dan Saudara Para Kepala Instansi Vertikal, Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung, Para Kolega Anggota Dewan, Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, LSM, Pemerhati Dewan.dan hadzirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan hadzirat-Nya atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan innayah-Nya sehingga kita dapat menyelenggarakan agenda konstitusional Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat serta damai dan sejahtera.
Saudara Ketua dan Sidang Dewan Yth.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Nusantara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Temanggung Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang menjadi agenda Sidang Dewan hari ini, Fraksi Nusantara menyampaikan apresiasinya kepada Saudara Bupati Temanggung atas kerja keras dan upaya maksimalnya yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan konstitusi dengan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya agar dibahas oleh DPRD guna diberikan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di waktu yang akan datang. Dan kami memberikan apresiasi juga kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung atas kerja kerasnya sehingga dapat diraihinya beberapa Penghargaan.

Saudara Ketua dan Rapat Dewan Yth.

Fraksi Nusantara telah mempelajari dengan seksama Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan menyampaikan pandangan umumnya berupa pernyataan, pertanyaan dan permintaan penjelasan sebagai berikut :

1. Fraksi kami mengapresiasi terhadap capaian target pendapatan secara umum yang menembus angka 104,64% dari target awal. Hal ini menjadi salah satu pendorong terhadap pelampauan target pendapatan utamanya di sektor pajak daerah dari target Rp.45.834.000.000 teralisasi menjadi Rp. 52.832.251.119 (115,27%).

Pertanyaannya adalah apakah capaian target tersebut selama ini telah mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang lahan pertaniannya masuk dalam penetapan LP2B seluas 20.709 Ha dan LCP2B seluas 5.000 Ha, sebab dalam Perda nya ada klausul pasal yang menyebutkan bahwa lahan yang menjadi obyek LP2B/LCP2B berhak mendapat insentif berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan. Mohon penjelasannya”

2. Terhadap program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di kegiatan:
 - a. Prevalensi balita gizi buruk Target 0,5 % realisasi 0,18%.
 - b. Angka kematian balita Target 13,18% realisasi 14,05%. dari data kegiatan tersebut fraksi kami menyoroti capaian angka realisasi kegiatan tersebut semestinya berbanding terbalik agar program tersebut dianggap berhasil. Apa yang menjadi faktor penyebab dari 2 kegiatan tersebut hingga hasil dari capaian tersebut menurut kami kurang baik. Apakah timbulnya stunting yg masih relatif tinggi di kabupaten Temanggung (20,5%) di tahun 2021 disebabkan oleh salah satunya adalah dampak pemenuhan gizi buruk pada balita?

- c. Apa yang menjadi penyebab dengan terjadinya angka kematian ibu Target 75,5 per 100.000 KH, dengan realisasi 174,38 per 100.000 KH mohon penjelasannya?
3. menyikapi kondisi saat ini terutama pada petani tembakau, banyak yang mengeluh dengan kondisi kenyataan yang riil dengan harga tembakau yang sangat rendah yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun hingga berakibat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Apakah langkah Saudara Bupati untuk menyikapi kondisi tersebut? Sementara upaya-upaya pendekatan ke pabrikaan untuk mengangkat derajat petani tembakau selama ini tidak mempunyai daya angkat.
4. Masih ditemuinya kelangkaan pupuk ditingkat pengecer dengan harga yang cukup tinggi mohon penjelasan.

Saudara Ketua dan Sidang Dewan Yth.

Demikian Pendapat Fraksi Nusantara. Jika ada kekurangan dan kesalahan adalah tanggungjawab kami dan untuk itu kami mohon maaf, sementara jika ada manfaatnya semata-mata itu adalah milik Allah SWT. Teriring doa semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memudahkan langkah kita dalam menjalankan amanah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temanggung, 9 Maret 2022

FRAKSI NUSANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Isnarwandi, S.Ag Sekretaris Umi Fadillah di tandatangani

Kepada saudari Siti Margo Lestari, BA selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara kami sampaikan terimakasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa disilakan ----- Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI OLEH

DEDI HARYADI, SE

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semuanya

Kepada yang terhormat. Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Kepada yang terhormat. Saudara Bupati Temanggung beserta Wakil Bupati Temanggung

Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung atau yang mewakili

Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD, Serta Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung, dan

Yang kami hormati, Para Anggota Dewan serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, ahli warisnya, yang senantiasa kita harapkan syafaat-nya dari dunia sampai di yaumul qiyamah. Allah Huma Amiin.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Berbahagia;

LKPJ Bupati Tahun anggaran 2021 merupakan gambaran umum pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, yang harus disampaikan oleh Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disamping itu LKPJ juga diharapkan menjadi sumber informasi yang dapat menunjukkan hasil kerja pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta berkeadilan.

Sebagaimana diketahui ada beberapa indikator yang dapat dijadikan parameter keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada sektor yang lain, seperti perdagangan, industri dan pertanian. Sedang IPM sebagai indikator komposit yang menggambarkan keterkaitan antara indikator pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Angka (IPM) atau Human Development Indexs (HDI) juga menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai Out Come dari kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Berbahagia;

Pada kesempatan ini FPKB perlu merasa bersyukur dan ucapan terimakasih sekaligus memberikan apresiasi serta penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang sudah ditetapkan pada tahun anggaran 2021 yang secara umum berjalan cukup baik, meskipun tentu saja ada beberapa hal yang perlu untuk terus disempurnakan dan ditingkatkan.

Setelah mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung tahun 2021, maka FPKB perlu menyampaikan pandangan umum sebagai berikut:

1. Bidang kesehatan :

Dari 12 item realisasi capaian kinerja urusan kesehatan yang menjadi pertanyaan FPKB adalah :

- Kenapa tidak ada laporan realisasi capaian kinerja dalam penanganan pandemi covid 19, padahal pada tahun 2021 salah satu prioritas utamanya adalah penanganan pandemi covid 19, mohon di penjelasan..?
- Masih rendahnya realisasi capaian pelayanan dasar usia produktif, menurut FPKB ini sangat penting mengingat hal ini akan sangat berdampak serius terhadap lahirnya anak-anak yang sehat dan berkualitas, menekan akan stunting. Mohon penjelasan ?

2. Di bidang pendidikan yang menjadi sorotan FPKB terkait dengan masih sangat rendahnya realisasi capaian pelayanan dasar pendidikan kesetaraan (25.52 %), ini penting untuk diperhatikan karena akan sangat berpengaruh terhadap akses lapangan kerja dan angka pengangguran. Mohon di jelaskan langkah-langkah yang akan di lakukan.?

3. Dalam bidang Pelayanan Publik masih rendah dilihat dari data capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Temanggung 2021 yaitu hanya berkisar 64.50%, hal ini membuktikan bahwa tingkat pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat masih kurang atau belum maksimal, untuk itu catatan kami (FPKB), bahwa pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu kami berharap selayaknya pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mohon penjelasan!

4. Terkait Infrastruktur prosentase capaian kondisi baik di tahun 2021 yaitu 83,90 %, katagori baik akan tetapi realitas dilapangan kami melihat masih ada jalan yg kondisinya masih memprihatinkan, pada saat ini menjadi jalan utama yg menghubungkan Kecamatan Candiroto dan Kecamatan Tretep, dan hal ini sudah diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan mulai tahun anggaran 2019, 2021 dan 2023 tapi tidak pernah di respon oleh Pemda, untuk itu catatan FPKB bahwa pemerataan pembangunan wilayah untuk benar-benar diperhatikan oleh Bupati. Mohon penjelasan!

5. Banyak rekomendasi DPRD yang sudah disampaikan pada pembahasan LKPJ tahun sebelumnya, namun FPKB melihat bahwa rekomendasi DPRD sebagaimana hanya ditindak-lanjuti dengan rapat-rapat koordinasi ataupun sosialisasi, belum sampai pada tahapan eksekusi seperti penataan pedagang kaki lima, optimalisasi plaza

Temanggung serta penataan lalu-lintas angkutan di sekitar Pasar Kliwon dan rencana pengadaan TPA Temanggung Utara. Mohon tanggapannya!

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Penyampaian LKPJ Bupati tahun 2021 dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 9 Maret 2022

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Mahzum Sekretaris Umi Tsuwaibah di tandatangi

Kepada saudara Edi Hariyadi, SE selaku Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Fraksi Gerindra untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra disilakan -----
Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA OLEH CHAKIEM HARMOKO H.CK.SH
--

PENDAPAT FRAKSI GERINDRA Nomor : 35 /FG-PU/ III /2022 Terhadap : LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2021

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan

Yang Terhormat, Sdr. Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Sdr. Wakil Bupati Temanggung

Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, Staf Ahli Bupati, Jajaran KPUD Temanggung, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Dan para semua peserta rapat yang mengikuti secara daring

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna dengan sehat tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk

menyampaikan Pendapat Fraksi GERINDRA terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum ini, kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas konstitusionalnya selaku Kepala Daerah yakni menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). Sesuai ketentuan LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Pembahasan dan penilaian terhadap kinerja Kepala Daerah ini merupakan hal penting terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta tujuan kita untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tahun 2021 lalu.

Dalam LKPJ ini disampaikan capaian kinerja pembangunan yang terurai dalam 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berurusan dengan pelayanan dasar dan 5 urusan pilihan, hal ini telah sesuai dengan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Fraksi GERINDA perlu menyampaikan beberapa pertanyaan, Permohonan Tanggapan Dan Penjelasan Yang Antara Lain Sebagai Berikut :

1. Urusan Sosial

- a. Bantuan sembako yang melalui e-warung, yang terjadi di lapangan semua harga diatas harga eceran tertinggi, hal ini terkesan, rakyat miskin malah membeli sembako dengan harga tinggi.
- b. Pada Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ditemukan adanya kewajiban penerima dana 600 ribu untuk dibelanjakan di warung tertentu dengan sebuah paksaan oleh beberapa oknum, seharusnya bantuan tersebut dapat menjadi hak penerima untuk dipergunakan sesuai kebutuhan masyarakat, ini adalah salah satu bukti bahwa Pemerintah atau dinas sosial tidak hadir dan cenderung melakukan pembiaran. Permasalahan ini lama tapi tidak ada penindakan apapun, bahkan ada Surat Edaran dari Sekda yang berisi bahwa penyaluran beras harus melalui uji sertifikasi, apakah ada dasar aturannya?, mohon penjelasannya
Apakah kualitas beras juga sebaik harganya yaitu seharga 11.000 per kilo? Kami menemukan kualitas beras tidak bagus dan rata-rata seharga maksimal 9.000 rupiah per kilo, mohon tanggapannya

2. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- a. Kegiatan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2021 tidak dianggarkan lagi, dan sudah tahun ketiga tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya anggaran. Padahal kegiatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai salah satu kegiatan untuk pengentasan kemiskinan sesuai amanat RPJMD, mohon tanggapannya.
 - b. Pemerintah Daerah harus membuat suatu kurikulum pendidikan tentang sampah sebagai muatan lokal pada tingkat PAUD, TK, SD maupun SMP, hal ini sebagai upaya pembenahi Sumber Daya Manusia sejak dini, karena persoalan sampah adalah program panjang.
 - c. Program Pengelolaan Persampahan khususnya kegiatan TPSD dan adanya Dewan Persampahan, seharusnya mengurangi volume sampah yang dihasilkan oleh TPA Kranggan oleh karena sampah yang dibuang adalah sampah residu, namun pada kenyataan di lapangan volume sampah di TPA sanggrahan Krangan malah melebihi kapasitas semula. Mohon penjelasannya
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
- a. Kelangkaan pupuk disaat musim tanam menjadi permasalahan yang setiap saat berulang hingga saat ini, bagaimana peran pemerintah daerah agar permasalahan ini tidak membudaya, mohon penjelasan.
 - b. Distribusi Pupuk harus ada kejelasan, karena selama ini keluhan dari petani adalah adanya keterlambatan pasokan pupuk, tata niaga pupuk harus dibenahi agar semua kios pertanian dapat mendistribusikan pupuk secara leluasa, mohon tanggapannya.
 - c. Terkait kenaikan cukai tembakau, apakah ada jaminan bagi petani tembakau untuk menghadapi musim tembakau tahun ini harga apakah akan stabil, terlebih dengan adanya berita nasional pada musim tahun kemarin seolah olah harga tembakau tinggi padahal sebagian besar petani tembakau dibeli oleh perusahaan dibawah standar dan hanya sebagian tembakau yg harganya tinggi, sehingga menimbulkan suatu gejolak masalah yang seolah-olah semua petani tembakau mendapatkan keuntungan besar di musim tembakau tahun kemarin. Mohon di evaluasi kembali, apakah dengan adanya berita nasional yang notabene pembelian dan penjualan tembakau yang fantastis memicu kenaikan cukai tembakau ? Mohon kepada bupati agar lebih bijak lagi dalam memberikan statment ke media masa, dianalisis betul dan harus berimbang dengan kenyataan di lapangan, terbukti hal tersebut disanggah oleh salah satu kepala desa bahwasannya pembelian tembakau di pabrikaan tidak semua petani merasakan harga yang tinggi, boleh dilakukan investigasi apalagi ada Gugus Tugas Pertembakauan yang memberikan masukan

ke Bupati, dan selama ini apakah pekerjaan gugus tugas pertembakauan ini berjalan maksimal ?, mohon penjelasannya.

4. Urusan Koperasi dan UKM

Dalam usaha pemulihan ekonomi, pemerintah harus hadir dan responsif terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Temanggung agar kembali hidup dan pemulihan ekonomi dapat tercapai dan ini harus ditarget agar supaya UMKM dapat berputar kembali roda perekonomiannya.

Pemda harus punya target investasi, bagaimana caranya menarik investor ke Temanggung, harus direncanakan dengan detail apalagi Bapeda juara 1 dalam perencanaan, seharusnya menjadi hal yg mudah bagi Bapeda dalam merencanakan mengenai pembangunan dan merencanakan arah pembangunan yg bisa menarik investor datang ke Temanggung, buktikan kalau Bapeda itu juara yg bukan di hanya sebagai juara kertas saja tapi juara yg bisa terencana di lapangan

5. Berkaitan dengan BUMD aneka usaha tentang mal manajemen (kesalahan direktur yang menggunakan modal usaha diluar anggaran dasar) sudah sampai tahap apa Keterkaitan dengan audit investigasi apakah sudah dilaksanakan dan hasilnya seperti apa, agar diberitakan secara publik agar masyarakat paham Mengganti program bisnis yg sudah tidak berjalan atau lebih berinovasi dalam melakukan bisnis agar menghasilkan keuntungan yang maksimal, mohon tanggapannya

6. Jangan ada indikasi permainan politik dalam hal perekrutan SDM di semua sektor BUMD, sehingga BUMD bisa berjalan secara profesional dan menghasilkan deviden secara maksimal serta adanya progresifitas dari manajemen tentang inovasi baru dalam usaha untuk memperbesar deviden tanpa mengesampingkan usaha-usaha yang sudah ada di masyarakat. Sebagai contoh, berani tidak salah satu BUMD yang ada di Kab Temanggung melompat atau merambah atau masuk bisnisnya ke Pasar Saham (IPO)

Mencermati capaian indikator kinerja pembangunan, Fraksi Gerindra dapat memahami bahwa secara keseluruhan capaian kinerja pembangunan dimaksud rata-rata telah mencukupi. Meskipun terhadap beberapa indikator perlu mendapatkan perhatian serta klarifikasi atas capaian kinerja dimaksud.

Namun kita semua menyadari bahwa prestasi dan capaian segenap kinerja pembangunan dimaksud bukanlah semata-mata merupakan peran Kepala Daerah beserta perangkat pemerintah daerah Kabupaten Temanggung, akan tetapi seluruh pemangku kepentingan pembangunan, unsur legislatif, dinas instansi vertikal termasuk berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha. Kami yakin seluruh pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk pembangunan memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan

kesejahteraan serta memajukan kehidupan masyarakat Kabupaten Temanggung menjadi lebih baik dan berkualitas.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Demikian Pandangan Umum Fraksi GERINDRA, apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 9 Maret 2022

FRAKSI GERINDRA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Drs. Andoyo Sekretaris Indah Cahyani, S. Sos keduanya di tandatangani

Kepada saudara Chakiem Harmoko H. CK. SH selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilakan ----- Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN OLEH AHMAD SYARIF YAHYA
--

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2021 DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Assalammuallaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua

Yang terhormat:

Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD

Saudara Bupati Temanggung dan Wakil Bupati Temanggung

Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) atau yang mewakilinya

Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.

Para Camat se kabupaten Temanggung

Sekretaris DPRD dan jajaran sekretariat DPRD

Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, Insan Pers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan pula kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang dapat hadir pada Rapat Paripurna kali ini.

Rapat Dewan yang Terhormat.

Didalam melihat LKPJ Bupati Temanggung 2021 kita merujuk pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dimana tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2018-2023. Mencermati apa yang disampaikan saudara Bupati sesaat tadi tentang pengantar LKPJ, FPPP melihat beberapa indikator makro daerah pada posisi yang cukup menggembirakan. Meskipun di tahun 2021 kita belum terlepas dari Pandemi Covid-19, namun secara umum bahwa capaian kinerja pemerintah daerah bisa dikatakan baik. Capaian kinerja Pemerintahan sesuai dengan target yang diharapkan dan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Ada beberapa masukan dan pertanyaan yang kami sampaikan dalam pembahasan LKPJ saat ini semoga nanti bisa sebagai dasar untuk perbaikan dimasa yang akan datang, Catatan kami pada LKPJ sebelumnya sudah memberikan rekomendasi agar melakukan perbaikan dalam hal perencanaan atau planning dan management pelaksanaan belanja langsung. Maka beberapa capaian program kerja berdasarkan misi dan visi, FPPP memberikan beberapa catatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Bahwa ada beberapa tempat usaha yang menyalahi tetaruang harusnya di tindak tegas dan fraksi Persatuan Pembangunan melihat saat ini seperti yang ada dalam Bulu Parakan tepatnya di pinggir jalan ada beberapa kegiatan pembangunan untuk perumahan pada hal kita tau bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan hijau tapi saat ini sudah dimulai bangun dan memiliki INB ini juga kita pertanyakan apakah sudah sesuai dengan Perda RTRW kita .

2. Urusan Kesehatan.

Secara umum program dan kegiatan di bidang Kesehatan hamper semuanya bisa terlaksana dengan baik. Bahkan capaiannya Sebagian melebihi target. Namun masalah pelayanan terutama di RSUD Temanggung masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

3. Urusan Pertanian.

Masalah keberhasilan bidang pertanian tidak bisa hanya dilihat dengan target dan capaian kinerja di perangkat daerah terkait. Namun harus secara riil di

lapangan dan terjun langsung di masyarakat. Terutama terkait dengan hasil tembakau.

Karena sampai saat ini setiap Panen Raya tembakau selalu menyisakan cerita-cerita pilu. Dan apa yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah berkaitan dengan panen raya tembakau dengan membentuk gugus tembakau belum bisa mengatasi carut marut para petani, FPPP melihat bahwa pembentukan gugus pertembakaun belum bisa efektif karena yang ada dilapangan gugus pertembakaun masih hanya mencatat dan menggali informasi tapi belum bisa memberikan solusi. Untuk itu kedepan agar pemda bisa benar- benar melakukan langkah efektif dengan prinsip dasar petani tembakau bisa menikmati hasil tembakaunya. Untuk itu dalam rangka mengatasi problematika tersebut FPPP berharap pemerintah daerah membangun KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau). Dengan adanya KIHT maka eksistensi petani Tembakau bisa tetap ada dan ikon Temanggung sebagai kota tembakau tidak sekedar hiasan, tetapi realitanya petani tembakau belum bisa gembira menikmati hasilnya. Petani tembakau belum bisa menikmatinya.

- RPJMD 2018-2023 dalam salah satu visinya adalah mewujudkan Peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan, sasaran yang dituju tidak berbanding lurus dengan petani, apakah pertanian modern itu hanya sebatas pergeser dari manual ke mesin atau bagaimana, ini yang perlu diperjelas, dan dalam visi dan misi ini FPPP melihat bahwa sektor ini masih dalam kondisi yang belum maksimal karena selama ini nilai tukar pertanian kabupaten Temanggung sangat rendah, artinya pola manual digeser kepola modern tetapi NTP tetap rendah, disamping itu kalau kita melihat pertanian berwawasan lingkungan ternyata hanya sebatas teoritis belaka, FPPP melihat dalam hal ini pertanian kita justru semakin jauh dari wawasan lingkungan, karena mayoritas petani tidak diarahkan untuk menggunakan pupuk organik tetapi pemerintah sendiri malah menganjurkan menggunakan pupuk kimia, seharusnya ada aturan khusus yang mulai diarahkan untuk para petani sadar akan lingkungan hidup.

4. Lingkungan Hidup.

- Perilaku masyarakat dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, Bupati agar segera membuat surat edaran dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk bisa membuat Perdes Tentang Lingkungan Hidup.

Rapat Dewan yang kami Hormati

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan semoga ada bermanfaat, kurang lebih dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Temanggung, 9 Maret 2022

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Rochmat Fauzi TH Sekretaris Ahmad Syarif Yahya kedua di tandatangani

Kepada saudara Ahmad Syarif Yahya selaku Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan disilakan ----- Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN OLEH RIYADI KAUNAEN SPd, MAP
--

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamu'alakum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat. Pimpinan rapat beserta para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Yang terhormat. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

Yang kami hormati. Forum komunikasai Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yang kami hormati. Sekertaris Daerah, asisten Sekda, serta jajaran eksekutif

Yang kami hormati. Rekan – rekan anggota Dewan

Yang kami hormati. Para camat se Kabupaten Temanggung

Yang kami hormati. Para pemerhati dewan, wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat ALLAH SWT / Tuhan YME karena limpahan rahmat dan berkat kepada kita sehingga dapat menghadiri rapat paripurna hari ini dengan tiada halangan suatu apapun.

Sidang yang terhormat,

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 tidak melebihi batas waktu yang telah di tentukan oleh paraturan perundangan yang berlaku. Kami melihat capaian kinerja pemerintah berdasarkan indikator kinerja daerah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan bahkan banyak yang berperstasi kami mengaprisiasi hal ini.

Setelah mendengar dan mempelajari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, Kami Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan beberapa hal yang semoga nanti bias memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah:

1. Terkait anggaran yang bersumber dari DBHCHT yang di peruntukkan kepada buruh tani tembakau tidak terealisasi di tahun anggaran 2021, Mohon Bupati penjelasannya ?
2. Sejauh mana Pemerintah daerah menanggapi hasil kajian pihak independen terkait PD Aneka Usaha karen ini sudah berlarut-larut, mohon penjelasannya ?

3. Bidang Pendidikan

Realisasi capaian pelayanan dasar pendidikan dasar yang baru tercapai 92,07 % dari jumlah anak usia 7 – 15 tahun ini artinya terdapat kurang lebih 9.000 anak yang tidak bersekolah ini satu kondisi yang sangat memperhatikan, mohon penjelasan dari Bupati?

Berikut Realisasi capaian dasar pelayanan dasar pendidikan kesetaraan hanya tercapai 25,52 % dimana masih jauh dari target. Apa yang menyebabkan capaian serendah itu dan upaya apa kedepan yang isa dilakukan oleh saudara Bupati, mohon penjelasannya ?

4. Kesehatan

Pelayanan dasar kesehatan pada balita, usia produktif, penderita hipertensi, dan orang terduga tuberkulosis capaiannya masih rendah, apa kendalanya, mohon penjelasan dan kedepan pemerintah daerah harus lebih serius dalam penanganan pelayanan dasar tersebut.

5. DPRKPLH

Apa penjelasan pemerintah daerah terkait pengelolaan limbah B3 yang capaiannya 0%. Mengingat limbah B3 berdampak bagi pencemaran lingkungan,apakah belum dianggap penting oleh Pemerintah Daerah mohon penjelasan saudara Bupati?

6. Masih di temukan beberapa perusahaan yang tidak membayar upah sesuai dengan UMK, hal ini sudah terjadi berulang kali dan pemerintah daerah terkesan mengabaikan aduan padahal ini juga merupakan bagian dari mewujudkan masyarakat yang tentrem, marem dan gendem, mohon penjelasan sdr Buapti ?

Demikian pandangan Fraksi kami, mohon maaf bila ada beberapa kekurangan kesalahan sekian dan terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Temanggung, 09 Maret 2022

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Dra. Titik Winarti Sekretaris Ika Rizkiwati keduanya di tandatangani

Kepada saudara Riyadi Kaunaen, SPd.MAP selaku Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan kami sampaikan terima kasih.

terakhir kami berikan kesempatan kepada Fraksi PAN Berkeadilan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan disilakan ----- Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKS PAN BERKEADILAN OLEH BUDI

PEMANDANGAN UMUM FRASI PAN BERKEADILAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI 2021

Yang kami Hormati, Pimpinan rapat dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung

Yang kami Hormati, Saudara Bupati dan Wakil Bupati

Yang kami Hormati, Jajaran FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Yang kami Hormati, Saudara Sekda dan para Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Yang kami Hormati Jajaran direktur BUMD Kabupaten Temanggung

Yang kami cintai rekan-rekan Anggota Dewan, jajaran setwan serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pemandangan umum Fraksi PAN Berkeadilan perihal LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021, Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap saudara Bupati yang telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, sehingga pada pagi hari ini menjadi pendorong kita untuk terus semangat dan kerja keras dalam memenuhi kewajiban kita sebagai Wakil Rakyat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Setelah melakukan pendalaman terhadap Draft LKPJ Bupati tahun anggaran 2021 ini, Fraksi PAN Berkeadilan mohon penjelasan dan tanggapan terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Fraksi PAN Berkeadilan menyampaikan apresiasi atas capaian prestasi kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tahun 2021, yang dibuktikan dengan banyak program yang tercapai bahkan melampaui target. Kami juga menyampaikan selamat atas prestasi dan penghargaan yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Terhadap program-program di tahun 2021 pemerintah masih belum maksimal dilihat dari tingginya angka SiLPA setiap tahun anggaran, dan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 262.479.562.511, apakah SiLPA ini sisa dari kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan? Mohan tanggapannya!

3. Fraksi PAN Berkeadilan menyangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Hal ini belum adanya terobosan / inovasi dalam menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD, Salah satu contoh strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan memanfaatkan dan mengelola dengan baik sektor pariwisata. Fraksi PAN Berkeadilan berpandangan bahwa Kabupaten Temanggung mempunyai potensi yang luar biasa besar yang tidak kalah dengan Kabupaten dan Kota lain yang telah terlebih dahulu maju di sektor pariwisatanya. Namun sayang, kami belum melihat upaya serius dari Pemerintah Daerah untuk membuat sebuah grand design dengan strategi yang matang yang dapat membawa kejayaan Temanggung melalui pemanfaatan sektor pariwisata secara optimal. Mohon tanggapannya!
4. Terkait realisasi capaian jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan yang hanya 25.52% kami berharap ada upaya serius dari pemerintah daerah sehingga minat belajar anak usia 7- 18 tahun ini meningkat karena ada perhatian khusus dari pemerintah daerah. Mohon tanggapannya!
5. Salah satu solusi penanganan kemiskinan adalah melalui program bedah rumah yang merupakan kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH). Program ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan terpadu dan sinergis antar OPD terkait, meliputi Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan lembaga ekonomi termasuk Badan Amil Zakat Namun sayangnya, Fraksi PAN Berkeadilan melihat bahwa selama ini Pemerintah Daerah belum serius dalam menangani masalah tersebut, terbukti dengan tidak teranggarkannya program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) ini dalam APBD Kabupaten Temanggung selama tiga tahun anggaran berturut-turut, padahal data menunjukkan bahwa angka Rumah Tidak Layak Huni yang belum tertangani di Kabupaten Temanggung berada di sekitar angka 11 ribu RTLH. Mohon tanggapannya
6. Fraksi PAN Berkeadilan memandang bahwa masih banyak jaringan jalan di Kabupaten Temanggung yang harus dibenahi dan menjadi perhatian kita bersama agar dapat ditingkatkan menjadi jalan dengan kualitas yang baik. Namun, kita sadari bersama bahwa APBD Kabupaten Temanggung belum mampu mengakomodir pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga perlu adanya intervensi anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun APBN. Oleh sebab itu, kami berharap agar Pemerintah Daerah lebih pro aktif dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk merencanakan pembangunan secara

paripurna, bukan sepotong-sepotong seperti yang selama ini dilakukan. Mohon tanggapannya!

Demikian Pemandangan umum Fraksi PAN Berkeadilan tentang LKPJ Bupati 2021. Semoga untuk kedepannya menjadi lebih baik, Mohon maaf atas jika ada kesalahan dalam penyampaian pemandangan umum ini.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalaamualaikum Wr. W b

Temanggung, 9 Maret 2022

Fraksi PAN Berkeadilan DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua Badrun Mustofa, S.Pd Sekretaris Bejo Tursiyam, SE. keduanya ditandatangani

Kepada saudara Budi selaku Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan kami sampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Sesaat tadi telah kita ikuti Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021.

Dari Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dimaksud, terdapat beberapa pertanyaan, usul, saran, dan permintaan penjelasan kepada Saudara Bupati Temanggung. Untuk itu, guna memberikan waktu kepada saudara Bupati dalam menyusun jawaban dan/atau pertanyaan, tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD dimaksud, maka kami usulkan Rapat Paripurna DPRD kita skors selama 60 menit.

Apakah usul kami dapat diterima ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat :

(ketuk palu 1 kali) terima kasih

Dengan demikian rapat kita skors selama 60 menit dan kita lanjutkan kembali pada pukul 14.00 WIB.

SKORS

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang terhormat.

Skors kami cabut dan Rapat Paripurna kami buka kembali ----- ketuk palu 1 kali.

Selanjutnya kepada saudara Bupati kami minta untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021.

Kepada Saudara Bupati Temanggung disilakan. ----- Stop.

PENYAMPAIAN TANGGAPAN / JAWABAN BUPATI TEMANGGUNG OLEH H. M. AL KHADZIQ
--

TANGGAPAN BUPATI TEMANGGUNG ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semuanya

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, serta Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD kali ini dalam keadaan sehat wal afiyat.

Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung atas apresiasi, usulan, masukan, dan sarannya pada Pemandangan Umum yang telah disampaikan.

Atas saran, masukan, dan permintaan penjelasan dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

I. FRAKSI PARTAI GOLKAR

A. Kebijakan Umum

Bidang Belanja Terkait dengan SILPA yang cukup besar dari DBHCHT dapat kami sampaikan bahwa akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya berdasarkan PMK Nomor 215 Tahun 2021, dimana ketentuan didalamnya lebih fleksibel dan memungkinkan untuk dilaksanakan di daerah sebagai penghasil bahan baku tembakau. Sedangkan untuk PD Aneka Usaha masih dalam kajian kami.

B. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

1. Pendidikan

Berkaitan dengan pertanyaan pada bidang Pendidikan tentang Realisasi capaian pelayanan dasar pendidikan dasar yang baru tercapai 92,07 % dari jumlah anak usia 7 – 15 tahun artinya terdapat kurang lebih 9.000 anak yang tidak sekolah, dapat kami sampaikan Angka 92,07% adalah angka partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah anak usia 7-15 tahun yang bersekolah di pendidikan formal dan non formal di wilayah Kabupaten Temanggung dibagi jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun. Dari kurang lebih 9.000 anak sejumlah 4.477 telah menempuh pendidikan di luar Kabupaten Temanggung, sehingga sebenarnya pelayanan pendidikan dasar telah tercapai 96,46%.

2. Kesehatan

Berkaitan dengan pertanyaan bidang Kesehatan Rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengatasi selain percepatan vaksinasi dan sosialisasi dapat

kami sampaikan bahwa dalam rangka penanganan untuk menunjang kualitas Kesehatan masyarakat diambil Langkah-langkah pembatasan kegiatan masyarakat dan pemberian suplemen terutama kepada pasien isoman selain percepatan vaksinasi dan sosialisasi prokes.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, namun harus diselesaikan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Untuk itu sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020, maka perlu peningkatan peran serta partisipasi masyarakat, maka di Kabupaten Temanggung di bentuk Lembaga Pengelolaan Masyarakat secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Rukun Tetangga. Lembaga-lembaga tersebut seperti Dewan Persampahan, Fasilitator Persampahan Tingkat Kecamatan, Fasilitator Persampahan Tingkat Desa, kemudian Tingkat Rukun Tetangga ada Penggiat Sampah Rukun Tetangga.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berkaitan dengan pertanyaan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang bertambahnya kepadatan bangunan dapat kami sampaikan bahwa setiap pembangunan gedung tetap dikendalikan dalam penerbitan perizinan bangunan, luas ruang terbuka minimal 10% dari luas bidang kapling yang akan dibangun.

5. Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan pertanyaan Bidang Lingkungan Hidup tentang limbah bahan berbahaya perlu adanya inisiatif dari semua pihak agar tidak terjadi pencemaran dari limbah dapat kami sampaikan bahwa UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah juga aturan tentang Lingkungan Hidup termasuk dalam pengelolaan Limbah B3.

6. Pertanian

Berkaitan dengan Capaian produksi yang menggembirakan tidak dibarengi dengan daya beli yang menguntungkan petani. Sehingga Petani tidak mampu menikmati kesejahteraan meskipun sudah bekerja keras. Dinas semestinya mampu melakukan tindakan penataan kuantitas komoditas agar tidak terjadi over produksi yang menyebabkan pelemahan nilai tawar petani, dapat kami sampaikan bahwa kami berterima kasih atas masukannnya, kami akan melaksanakan penyuluhan kepada petani untuk menanam dengan

memperhatikan musim serta sesuai GAP, memperhatikan kebutuhan pasar dan trend daerah sekitar, sehingga meminimalisir over produksi.

C. Urusan Pilihan

1. Pertanian

Berkaitan dengan belum adanya produk yang dapat dijadikan ciri khas Temanggung, dapat kami sampaikan bahwa Kabupaten Temanggung memiliki produk unggulan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung, dimana penetapan produknya salah satunya berdasarkan ke-khas-an daerah dan indikator-indikator lain.

2. Perindustrian

Berkaitan dengan belum adanya produk yang dapat dijadikan ciri khas Temanggung, dapat kami sampaikan bahwa Temanggung memiliki produk unggulan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung, dimana penetapan produk salah satunya berdasarkan ke-khas-an daerah dan indikator-indikator lain.

II. FRAKSI NUSANTARA

1. Terkait dengan keringanan PBB bagi oyek LP2B dan LCP2B, dapat kami sampaikan bahwa pengaturan secara khusus terhadap hal tersebut belum ada. Namun demikian insentif secara umum telah kami berikan kepada semua wajib pajak selama 3 tahun terakhir ini.
2. Terkait Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di kegiatan dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Prevalensi balita gizi buruk target 0,5% dengan realiasi 0,18% dapat dikatakan balita dengan gizi buruk di kabupaten Temanggung menurun (baik) karena makin kecil capaian dikatakan makin baik.
 - b. Angka kematian balita, dapat dikatakan bahwa jumlah kematian balita tahun 2021 menurun, akan tetapi jumlah kelahiran hidup bayi yang digunakan sebagai dasar perhitungan menurun sehingga Angka kematian balita terlihat tinggi.
 - c. Angka Kematian Ibu target 75,5 per 100.000 kelahiran hidup realisasi 174,38 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini disebabkan dengan meningkatnya jumlah kematian ibu sebanyak 17 kematian ibu dimana 9 diantaranya disebabkan Covid-19.
3. Berkaitan dengan pendekatan ke pabrikan untuk mengangkat derajat petani tembakau pemerintah daerah akan melakukan upaya-upaya mengkomunikasikan

kepada pabrikan tembakau agar tembakau asli Temanggung dibeli dengan harga tinggi.

4. Berkaitan dengan pertanyaan a dan b, dapat kami sampaikan bahwa:

- a. Peran pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan pupuk di setiap musim tanam :
 - 1) Menerbitkan Keputusan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi;
 - 2) Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tentang Penetapan alokasi pupuk bersubsidi per petani Kabupaten Temanggung.
- b. Tata Niaga Pupuk secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Di tingkat Kabupaten, pengawasan terhadap penyaluran pupuk subsidi dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
- c. Telah dilaksanakan koordinasi dan moneyv bersama tim KP3 kabupaten, provinsi, dan Kementerian Pertanian per triwulan.
- d. Usulan kebutuhan pupuk subsidi tahun 2022 dilakukan lewat sistem e- RDKK kementerian (jadwal input Juni-Oktober).
- e. Usulan tambah kurang kebutuhan pupuk subsidi secara berjenjang dari kabupaten ke provinsi dan pusat
- f. Sudah dilakukan sosialisasi pengawalan distribusi pupuk subsidi per Kecamatan
- g. Pengendalian distribusi melalui penyusunan SK alokasi dan realokasi pupuk subsidi

III. FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa

1. Bidang Kesehatan

- Berkaitan dengan tidak adanya laporan realisasi capaian kinerja dalam penanganan pandemi covid-19, dapat kami sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati sesuai sistematika pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup nya adalah :
 - a. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
 - b. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasanSehubungan dengan hal tersebut, realisasi capaian kinerja penanganan pandemi covid-19 akan kami laporkan pada kesempatan yang lain

2. Terkait realisasi capaian jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan yang hanya 25.52%, dapat kami sampaikan bahwa Anak usia didik 7-18 tahun sebagian besar

sudah terlayani di pendidikan formal (SD, SMP dan SMA) sehingga pelayanan dasar pendidikan kesetaraan hanya melayani anak usia 7- 18 tahun.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah, antara lain karena faktor ekonomi.

Kami sepakat untuk memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan minat anak usia 7-18 tahun untuk menempuh pendidikan kesetaraan.

IV. FRAKSI GERINDRA

1. Urusan Sosial

Di dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan program sembako di Kabupaten Temanggung, menurut laporan dari dinas terkait telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun Pemerintah Daerah akan terus melakukan pengawasan di lapangan dan bilamana terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan akan ditegakkan sebagaimana mestinya.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

a. Berkaitan dengan program RTLH kami berharap pada tahun anggaran berikutnya dapat menjadi salah satu prioritas anggaran.

b. Terkait dengan usulan perlunya muatan lokal tentang pengelolaan persampahan pada kurikulum PAUD, TK, SD maupun SMP, akan kami perhatikan dan akan kami kaji secara mendalam dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait baik itu lingkungan Dinas Pendidikan para Tokoh Masyarakat para pengelola persampahan Dinas Lingkungan Hidup , legislative dan lain-liannya.

c. Berkaitan dengan pengelolaan sampah di TPSD akan kami terus maksimalkan agar sampah ini tidak semuanya masuk ke TPA tetapi dapat di pilah dan di pisah seseuai dengan jenisnya dan diolah menjadi berkah.

3. Jawaban untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sama dengan jawaban Fraksi Nusantara Nomor 4.

4. Terkait dengan perlunya peningkatan investasi di Kabupaten Temanggung akan kami perhatikan.

5. Terkait dengan audit investigasi pada Perumda Aneka Usaha akan kami tindaklanjuti dan dalam waktu dekat seluruh laporan KAP dari BUMD BUMD Kabupaten Temanggung akan dikaji dan diolah sebagaimana mestinya.

6. Terkait dengan saran agar perekrutan SDM di BUMD dilakukan secara transparan dan akuntabel kami sependapat, dan ini telah kita lakukan pada tahun kemarin dengan rekrutmen di PDAM dengan sistem CAT Komputer Asistet Tes CAT ini untuk menjamin adanya keterbukaan obyektifitas dan verifes dalam perekrutan SDM di BUMD tersebut.

7. Selanjutnya terkait dengan IPO (Initial Public Offering) atau penawaran saham perdana bagi masyarakat luas oleh BUMD akan kami kaji.

V. FRAKSI PPP

1. Berkaitan dengan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
 - a. Masih seringnya terjadi genangan saat hujan deras, dapat kami sampaikan hal tersebut akan kami cari jalan keluar yang terbaik.
 - b. Perda RTRW belum sepenuhnya secara komprehensif dipahami, dapat kami sampaikan Sosialisasi Perda RTRW sudah terus dilakukan.
 - c. Penetapan kawasan perntukan industri perlu pembinaan, dapat kami sampaikan Secara kebijakan pemenuhan infrastruktur di KPI telah terdapat dalam indikator program Perda No I tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung 2012 – 2031 dan dalam RPJMD, akan tetapi pada saat implementasi dari kebijakan sampai tahap penganggaran pemenuhan infrastruktur di KPI terutama jalan kalah prioritasnya.
 - d. Adanya beberapa tempat usaha yang menyalahi tata ruang harusnya ditindak tegas, dapat kami sampaikan hal tersebut akan kami tindaklanjuti.
2. Urusan Koperasi dan UMKM:
 - a. Berkaitan dengan Dukungan untuk pengembangan UMKM, dapat kami sampaikan bahwa Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya pembinaan, pengembangan, pendampingan dan pemberdayaan melalui peningkatan kualitas SDM UMKM antara lain:
 1. Pelatihan Keterampilan Usaha
 2. Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha untuk UMKM
 3. Pelatihan Produk dan Inovasi Produk Unggulan melalui Perbaikan Kemasan
 4. Pelatihan Stategi Pemasaran
 5. Pelatihan Digital Marketing
 6. Pelatihan Literasi Keuangan
 7. Fasilitasi Perizinan Usaha (penyuluhan, konsultasi, pendampingan) dll
 - b. Berkaitan dengan saran terkait kemudahan dalam pemberian ijin usaha agar produk UMKM dapat bersaing di pasar modern, kami sampaikan terima kasih atas saran tersebut sebagai bahan evaluasi kami.
3. Berkaitan dengan pelayanan RSUD dapat kami sampaikan dalam rangka mempercepat pelayanan khususnya dari pendaftaran pasien, bahwa pendaftaran sekarang sudah bisa melalui 2 (dua) cara yaitu melalui pendaftaran-online dan melalui pendaftaran aplikasi yang bisa diakses masyarakat sehingga masyarakat tidak harus antri ditempat tetapi bisa dengan mendaftar secara online dan RSUD

juga telah bekerja sama untuk pengantaran obat dengan perusahaan pengantaran seperti Greb.

4. Berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan, dapat kami sampaikan bahwa tahun 2022 telah dilaksanakan monitoring ketenagakerjaan oleh tim terpadu yang terdiri dari Dinas perindustrian dan tenaga kerja bekerja sama dengan Pengawas ketenagakerjaan wilayah serta BPJS baik ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Dari hasil monitoring diberikan rekomendasi kepada masing-masing perusahaan yang harus segera ditindaklanjuti dengan jangka waktu 30 hari dan wajib melaporkan hasilnya ke Dinas perindustrian dan tenaga kerja.
5. Berkaitan dengan urusan pertanian :
 - a. Berkaitan dengan problematika pertembakauan, dapat kami sampaikan bahwa terima kasih atas saran masukan, akan kami jadikan evaluasi menyeluruh pada musim tembakau yang akan datang sebagaimana jawaban kami pada Fraksi Gerindra No.3 C. Dan berkaitan dengan hal itu kami akan mengkaji kemungkinan pihak eksekutif mengajukan inisiatif kepada DPRD Kabupaten Temanggung untuk membuat Perda Pertembakauan dan perlindungan tembakau asli Temanggung demi meningkatkan kesejahteraan petani tembakau pada khususnya dan masyarakat Temanggung pada umumnya.
 - b. Berkaitan dengan hasil produksi pertanian yang ternyata belum bisa mensejahterakan petani, nilai tukar ekonomi petani masih sangat rendah, adanya faktor kelestarian lingkungan yang diabaikan, dapat kami sampaikan bahwa secara berkesinambngan kami telah melaksanakan kegiatan konservasi untuk lahan pertanian dengan sipil teknis dan culture teknis guna meminimalkan kerusakan lingkungan serta kami terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat
 - c. Berkaitan dengan salah satu visi dalam RPJMD 2018-2023 adalah mewujudkan Peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan, dapat kami sampaikan bahwa secara berkesinambungan kami sudah menggalakkan integrated farming (pertanian terintegrasi), yang salah satunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik secara berkelanjutan dan mandiri guna mengurangi ketergantungan penggunaan pupuk kimia.
6. Berkaitan dengan urusan lingkungan hidup
 - a. Berkaitan dengan meluasnya lahan kritis, dapat kami sampaikan bahwa Pada tahun 2021 ini, untuk upaya penanganan lahan kritis DPRKPLH Kabupaten Temanggung telah melaksanakan gerakan konservasi tanah dan air berkelanjutan melalui gerakan penanaman bibit pohon baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung , APBN, dan CSR. Gerakan Penanaman

dilaksanakan bekerja sama dengan organisasi masyarakat, relawan, pemerintah desa, serta seluruh unsur masyarakat. Diharapkan program ini terus dilanjutkan dan mendapat dukungan serta partisipasi dari semua pihak terkait.

- b. Berkaitan perilaku masyarakat dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan, kami sampaikan terimakasih atas masukan terkait bahwa kepala desa harus membuat Perdes tentang Lingkungan Hidup, selanjutnya kami akan mensosialisasikan dan mengawal hal tersebut.
 - c. Berkaitan dengan dampak pembangunan yang tidak terintegrasi dengan lingkungan hidup, dapat kami sampaikan bahwa terkait adanya banjir besar yang sering terjadi, hal tersebut menjadi perhatian kita bersama, salah satu mitigasi yang kita lakukan adalah dengan melakukan konservasi lahan dengan melibatkan semua elemen masyarakat yang ada
7. Berkaitan dengan sektor kebudayaan dan pariwisata dapat kami sampaikan bahwa Dinas Pariwisata telah menyusun Ripparkab sudah menentukan kebijakan KSPK dan KPPK sebagai wujud prioritas/ fokus pengembangan pariwisata di kabupaten Temanggung. Kegiatan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM, manajemen, maupun karya. Agar kualitas mereka meningkat, diharapkan nantinya bisa lebih produktif dan lebih menghasilkan secara ekonomis.

VI. FRAKSI PDI PERJUANGAN

1. Berkaitan dengan anggaran bersumber dari DBHCHT yang di peruntukkan kepada buruh tani tembakau tidak terealisasi di tahun anggaran 2021 dapat kami sampaikan bahwa tidak terealisasinya anggaran 2021 dikarenakan belum tersusunnya regulasi tentang BLT DBHCHT dan belum terlaksananya verifikasi dan validasi terhadap calon sasaran penerima. Hal ini terkait dengan ketentuan dalam Perbup Hibah dan Bantuan Sosial dimana data calon penerima harus masuk dalam perencanaan/PPAS tahun 2021, sedangkan ketentuan penggunaan DBHCHT untuk BLT baru muncul setelah APBD ditetapkan.
2. Berkaitan dengan hasil kajian pihak independen terkait PD Aneka Usaha dapat kami sampaikan bahwa jawaban sama dengan pertanyaan Fraksi Gerindra Nomor 5.
3. Berkaitan capaian pelayanan dasar pendidikan dasar yang baru tercapai 92,07 % dari jumlah anak usia 7 – 15 tahun artinya terdapat kurang lebih 9.000 anak yang tidak bersekolah, dapat kami sampaikan bahwa Angka 92,07% adalah angka partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah anak usia 7-15 tahun yang bersekolah di pendidikan formal dan non formal di wilayah Kabupaten Temanggung dibagi jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun. Dan kurang

lebih 9.000 anak sejumlah 4.477 anak usia 7 – 15 tahun menempuh pendidikan di luar Kabupaten Temanggung, sehingga sebenarnya pelayanan pendidikan dasar telah tercapai 96,46%.

Upaya yang dilakukan :

- a. Melakukan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat berupa PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
 - c. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan sehingga tidak ada anak usia 7-15 tahun yang terpaksa harus bersekolah di luar Kabupaten Temanggung
4. Berkaitan dengan Pelayanan dasar kesehatan dapat kami sampaikan :
- a. Pelayanan kesehatan balita tidak efektif karena adanya pembatasan kegiatan akibat adanya pandemi covid-19, sehingga kegiatan Posyandu tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - b. Pelayanan kesehatan usia produktif jawaban sama dengan jawaban Fraksi PKB nomor 1.
 - c. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi tidak dapat tercapai 100% karena masih kurangnya pemahaman tentang paradigma sehat dimana pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular dan datang ke layanan kesehatan sebelum jatuh sakit. dan
 - d. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis capaiannya masih rendah karena:
 - investigasi kontak tuberkulosis yang belum menyeluruh, beberapa wilayah puskesmas belum mempunyai kader aktif. Juga antrian laboratorium pemeriksaan tuberkulosis yang panjang, juga Kurangnya monitoring dan evaluasi program tuberkulosis difasilitas kesehatan dan juga Dengan adanya lonjakan pandemi Covid-19, yang berdampak pada ketakutan masyarakat untuk melakukan tes dahak.
5. Berkaitan dengan pertanyaan tentang pengelolaan limbah B-3 yang mencapai 0%, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan data yang ada 2021, belum ada ijin rincian teknis pengelolaan limbah B3, dan ada pihak ke 3 yang mengelola hal tersebut. Selama ini kami sudah sosialisasikan dan pengawasan terkait pengelolaan limbah B3
6. Berkaitan dengan Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dapat kami sampaikan bahwa sudah dilakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Temanggung, sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26

Tahun 2020 tusinya sebatas pembinaan kesejahteraan pekerja sesuai Perbup 26/ Tahun 2020.

Dan telah dilaksanakan monev di bulan Januari 2022 ini dan di tindaklanjuti dengan surat rekom ke perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan sesuai ketentuan perundangan, kemudian apabila belum bisa menindaklanjuti sesuai ketentuan tentang UMK, Dinas merekomendasikan ke Satwasker Wilayah Magelang untuk dilaksanakan pengawasan lebih lanjut

Sanksi tidak menerapkan UMK sesuai UU 11/2020 pasal 185 ayat 1 dan 2 sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun atau denda 100jt-400jt dan menjadi kewenangan Satwasker.

VII. FRAKSI PAN BERKEADILAN

1. Atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi PAN Berkeadilan terhadap capaian prestasi kerja dan beberapa penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, kami sampaikan terima kasih dan kedepan akan terus kita upayakan capaian kinerja yang lebih baik
2. Berkaitan dengan SILPA Tahun Anggaran 2021 sebesar 262.479.562.511, dapat kami jelaskan bahwa SILPA tersebut sebagian merupakan SILPA BLUD RSUD dan Puskesmas serta Sisa Dana BOS. Selain itu juga berasal dari pelampauan target pendapatan daerah dan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana, utamanya pada kegiatan yang bersumber dari DBHCHT.
3. Terkait dengan perlunya terobosan dan inovasi dalam peningkatan PAD dari sektor kepariwisataan dapat kami sampaikan bahwa saat ini sektor kepariwisataan sebagian besar dikelola oleh Pemerintah Desa, swasta dan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu atas usulan perlunya grand design pengembangan dan pemanfaatan sector pariwisata yang dapat menunjang PAD, akan kami perhatikan dan tindak lanjuti.
4. Terkait realisasi capaian jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan yang hanya 25.52%, dapat kami sampaikan bahwa Anak usia didik 7-18 tahun sebagian besar sudah terlayani di pendidikan formal (SD, SMP dan SMA) sehingga pelayanan dasar pendidikan kesetaraan hanya melayani anak usia 7- 18 tahun dengan alasan tertentu sehingga tidak dapat mengakses pendidikan formal.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah, diantara lain karena faktor ekonomi sehingga lebih memilih untuk bekerja, faktor sosio kultural (menikah dini) dan masih ada sebagian kecil masyarakat belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.

Kami sepakat untuk memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan minat anak usia 7-18 tahun untuk menempuh pendidikan kesetaraan.

Upaya yang dilakukan:

- a. Memberikan pemahaman (sosialisasi) kepada masyarakat bahwa pendidikan kesetaraan sama derajatnya dengan pendidikan formal, sehingga lulusan pendidikan kesetaraan juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.
 - b. Memperbaiki proses pelaksanaan pembelajaran di pendidikan kesetaraan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Melakukan pendataan anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
 - d. Kampanye Gerakan kembali ke sekolah yang mengajak anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah untuk kembali ke sekolah.
5. Berkaitan dengan pertanyaan Salah satu solusi penanganan kemiskinan adalah melalui program bedah rumah yang merupakan kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) dapat kami sampaikan RTLH dalam 3 tahun terakhir melalui APBD Kabupaten Temanggung masih terbatas anggarannya karena kena refocusing dimasa pandemi covid19, sehingga berusaha mengatasi dengan kolaborasi penganggaran dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, seperti Bankeuprov RTLH, DAK Perumahan, BSPS dan Rehabilitasi Sosial RTLH
6. Berkaitan dengan saran dapat kami sampaikan Terimakasih atas saran dan masukannya untuk peningkatan jalan secara tuntas, tidak sepotong sepotong, hal tersebut sudah kami laksanakan pada tahun 2021 melalui peningkatan dan
7. pelebaran jalan mulai dari sibajak- Muntung-Jumo- Ngadirejo - Tegong sampai Kedu, secara tuntas Untuk segmen jalan tertentu yang belum, akan kami Injutkan untuk tahun 2022.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian jawaban kami atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung, manakala terdapat penjelasan/jawaban yang dirasa kurang mencukupi atau ada permintaan penjelasan dan pertanyaan yang belum kami jelaskan kiranya dapat dibahas dan diperdalam pada Rapat Panitia Khusus.

Akhirnya, semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sebagai Penyelenggara Negara di Kabupaten Temanggung, agar segala amanah dan tugas yang kita emban mendapat bimbingan, petunjuk, dan lindungan-Nya. Aamiin.
Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Temanggung, 9 Maret 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

H.M. AL KHADZIQ

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang berbahagia.

Demikian tadi telah kita ikuti jawaban dan/ atau penjelasan Bupati Temanggung terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021.

Berdasarkan pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung, tanggapan dan/atau jawaban Bupati Temanggung, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menyetujui penyampaian Surat Bupati Temanggung Nomor: P/0409/130/01.1/II/2022 Tanggal 22 Februari 2022 Perihal Permohonan Pembahasan LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2021.
2. Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021 kepada Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung dan Panitia Khusus tersebut melaporkan hasil kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD berikutnya.
3. Membentuk Panitia Khusus pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021 dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang, terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung dengan komposisi sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	2 orang
3. Fraksi Partai Golkar	2 orang
4. Fraksi Gerindra	2 orang
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	2 orang
6. Fraksi PAN Berkeadilan	2 orang
7. Fraksi Nusantara	2 orang

Apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD:

Dapat!

Pimpinan Rapat:

(ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Selanjutnya kami persilakan kepada Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN ATAS PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan oleh Juru Bicarannya masing-masing terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021, serta jawaban dan/atau penjelasan Bupati Temanggung atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD dimaksud, maka DPRD perlu menyatakan pendapatnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung;

Mengingat: Satu dan seterusnya memperhatikan: 1. Surat Bupati Temanggung Nomor P/0409/130/01.1/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Permohonan Pembahasan LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2021; 2. Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021 yang disampaikan oleh Juru Bicarannya di depan Rapat Paripurna DPRD; 3. Jawaban dan/atau tanggapan Bupati Temanggung atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan di depan Rapat Paripurna DPRD; 4. Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten temanggung tanggal 9 Maret 2022.

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESTAU: Menyetujui Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021. KEFDUA: Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, kepada Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung berikutnya. KETIGA: membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten temanggung pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2021, dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang yang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung dengan komposisi sebagai berikut: 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 orang 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang 3. Fraksi Partai Golkar 2 orang 4. Fraksi Partai Gerindra 2 orang 5. Fraksi Partai persatuan pembangunan 2 orang 6. Fraksi PAN Berkeadilan 2 orang 7. Fraksi Nusantara 2 orang

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 9 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG KETA, YUNianto Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Yang terhormat. Bupati Temanggung 2. Yang terhormat. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pembacaan selesai

Kepada Saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

Rapat DPRD :

Dapat!

Pimpinan Rapat :

(ketuk palu 1 kali) Terima kasih

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun 2021-2022.

Atas nama DPRD kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung, Saudara Wakil Bupati Temanggung para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, dan hadirin yang telah mengikuti jalannya Rapat Paripurna, baik yang hadir diruangan ini maupun yang mengikuti acara Rapat Paripurna pada hari ini secara virtual dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucap Alhamdulillahirrobbil'alamin, Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan ke II Tahun 2021-2022 DPRD Kabupaten Temanggung hari ini, Rabu, 9 Maret 2022, dengan resmi kami nyatakan ditutup ----- ketuk palu 3 kali.

Temanggung 9 Maret 2022, Sekretaris rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si, Ketua Rapat Yuniarto, S.P.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Sekretaris Rapat,

AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si
Sekretaris DPRD